



Artikel Penelitian

Article history:

Received 11 November, 2023
Revised 8 December 2023
Accepted 11 December 2023

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Transparansi,
Partisipasi Masyarakat
Dan Efektivitas
Pengelolaan Keuangan
Kelurahan

Keywords:

Accountability, Transparency,
Community Participation and
Effectiveness of Village
Financial Management

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Nurlailah
Universitas Abdul Aziz
Lamadjido (Azlam), Palu

EMAIL

nurlailah.stie@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur

The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Village Financial Management in East Palu District

Rahma Yulita¹, Nurlailah^{2*}, Nunung Apriani³, Sri Dewi Fitriani⁴
^{1,2,3,4} Universitas Abdul Aziz Lamadjido (Azlam), Palu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ciri-ciri variabel yang sedang diteliti dan verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dengan menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun secara parsial terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

Abstract: This research aims to determine and analyze the influence of accountability, transparency and community participation on the effectiveness of sub-district financial management in East Palu District. This research is descriptive and verification. Descriptive is research that aims to obtain an overview of the characteristics of the variables being studied and verification is a type of research that aims to analyze the influence between variables using multiple linear regression. From the results of this research it can be concluded that accountability, transparency and community participation have a positive and significant influence simultaneously or partially on the effectiveness of sub-district financial management in East Palu District.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4586

Pages: 1975-1982

LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan amanat bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi agar melakukan pengaturan terkait dengan urusan rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, juga kelurahan sebagai salah satu unit pemerintahan yang terendah. Semakin bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa keberadaan kelurahan secara yuridis formal telah diakui. Dalam peraturan tersebut bahwa kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan bahwa kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak untuk mengelola dan mengatur anggaran keuangan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, wujud dari pelaksanaan program otonomi pengelolaan anggaran tersebut terdapat dalam bentuk penguatan manajemen kelurahan, sehingga masing-masing kelurahan ini telah diberi wewenang / otonomi pengelolaan anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.

Alokasi dana kelurahan menurut UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, berdasarkan permintaan dalam musyawarah saat musrembangkel dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya pembangunan fisik agar lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik yang sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi warga karena dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Pada dasarnya prinsip pengelolaan dana kelurahan yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan partisipasi seringkali diabaikan, dimana keberadaan ketiga prinsip ini tidak berjalan bersamaan dalam penerapannya. Pemerintah kadang hanya menjalankan prinsip akuntabilitas sebagaimana bentuk tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang memberikan kewenangan. Kadang juga, pemerintah hanya menjalankan keduanya yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk jawaban pemerintah akan tuntutan perkembangan informasi yang semakin pesat sehingga terpaksa untuk menjalankan keduanya dengan tuntutan bahwa pemerintah itu harus transparan dan akuntabel. Namun partisipasi masyarakat dalam pemerintahan tidak diperhatikan. Pengelolaan dana kelurahan harus menganut prinsip dan asas pengelolaan keuangan kelurahan yaitu prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif. Sehingga dalam upaya pembangunan kelurahan juga ketiga prinsip ini memberikan pengaruh yang akan membawa pada perubahan pembangunan kelurahan itu sendiri.

Anggaran pendapatan dan belanja kelurahan adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen kelurahan untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan kelurahan

kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana kelurahan dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang kelurahan.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2009). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat di ketahui secara luas oleh masyarakat dan penyediaan barang/jasa (Adhi, R. A., & Indrawati, 2017).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami dan Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010).

METODE

Penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ciri-ciri variabel yang sedang diteliti dan verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dengan menggunakan regresi linier berganda.

HASIL

Analisis Regresi Linier Berganda. Regresi linear berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap satu buah variable. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent.

Hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa secara statistik variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan partisipasi masyarakat (X3), mempunyai hubungan yang signifikan sehingga dapat dianalisis pengaruhnya.

Tabel 1. Perhitungan Regresi Linier Berganda

No	Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients t-hitung		Sig-t
		B	Std. Error	B	t	
1	(Constant)	5,398	2,832	1,906		0,065
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS						1977

2	Akuntabilitas (X1)	0,337	0,119	0,429	2,830	0,008
3	Transparansi (X2)	0,431	0,133	0,492	3,232	0,003
4	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,121	0,054	0,176	2,220	0,033
R-Squared (R ²)		= 0,806		F-hitung		= 48,428
Adj. R. Square		= 0,789		F-tabel ($\alpha = 0,05$)		= 2.870
Multiple R		= 0,898		t-tabel ($\alpha = 0,05$)		= 2.030

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan dari hasil pengolahan data pada table XX diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5,398 + 0,429X_1 + 0,492X_2 + 0,176X_3$$

Persamaan Regresi Linar Berganda di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel *independent* tersebut memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel *dependent* efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan. Hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

Nilai konstanta = 5,398 ini menunjukkan bahwa apabila variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat diabaikan atau konstan, maka efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan adalah sebesar 5,398.

Akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,429 dan menunjukkan adanya pengaruh positif variabel akuntabilitas terhadap variabel fektivitas pengelolaan keuangan kelurahan 0,429

Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,492 dan menunjukkan adanya pengaruh positif variabel transparansi terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan sebesar 0,492.

Partisipasi masyarakat memiliki koefisien regresi sebesar 0,176 dan menunjukkan adanya pengaruh positif variabel partisipasi masyarakat terhadap variabel efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan sebesar 0,176.

DISKUSI

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan pada kantor kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Pengelolaan keuangan pada kantor lurah di kecamatan Palu Timur menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik dan efektif.

Pengelolaan Keuangan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan kelurahan karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan kelurahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, keuangan kelurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan kelurahan secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas yang baik dan benar kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada desa tersebut. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah sedang dan akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18).

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan kelurahan.

Keuangan kelurahan digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan berhubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat (Maddatuang dkk, 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti (2019), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan pada kantor kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Pengelolaan keuangan pada kantor lurah di kecamatan Palu Timur menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan bersaran nilai koefisien akuntabilitas yaitu 0,429. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan akuntabilitas akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,429.

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelurahan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dapat dilakukan pengukuran kinerja pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan keuangan, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rika Ardiyanti pada tahun 2019 melakukan penelitian Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan pada kantor kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan bersaran nilai koefisien transparansi yaitu 0,492. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan transparansi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,492. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah kelurahan mengelola keuangan publik yang digunakan untuk kepentingan publik.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat (Tahir, 2021). Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Pengelolaan keuangan kelurahan harus mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana pengelolaan keuangan kelurahan membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar aparatur pemerintah dilingkungan kelurahan dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principle*) atau pihak yang berkepentingan. Dengan dilaksanakannya ketiga prinsip tersebut, diharap akan meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat setempat, penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bersangkutan, dan penggunaan keuangan kelurahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tegar Zudewa Putra (2019) dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa. Hal ini berarti semakin tinggi Transparansi yang dihasilkan maka akan semakin meningkat pula APBDes yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih Di kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan pada kantor kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan bersaran nilai koefisien partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,176. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan keuangan kelurahan sebesar 0,176. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan, dan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat (Maddatuang dkk,2020). Hal ini mengandung pengertian bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan kelurahan akan semakin efektif pengelolaan keuangan kelurahan tersebut.

Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkat kelurahan adalah memberikan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

KESIMPULAN

Dari pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

Dari pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

Dari pengujian menunjukkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

Dari pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur.

SARAN

Sebaiknya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan agar pengelolaan keuangan kelurahan di kecamatan Palu Timur semakin efektif.

Sebaiknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan, sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

Sebaiknya laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan kelurahan di kecamatan Palu Timur tepat waktu, agar diketahui bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan efektif.

Sebaiknya diberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan kritikan dan saran-saran kepada pemerintah kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM, 2014
- Adhi, R. A., & Indrawati, E. S. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Intensi Agresi pada Siswa Kelas XI SMK X Semarang. *Jurnal Empati*, Vol 6 (1), 357-364, 2017.
- Akmal Boedianto, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Penerbit Laksbang Pressindo, 2010
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2010.
- Bushman, R. M., and A. J. Smith, Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, FRBNY Economic Policy Review, 2003
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia, 2010
- Citra Kumala Dewi, M. Iqbal A, dan Fadli Moh, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, 2019
- Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, 2020
- Deddi Nordiawan, dkk. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- David O. Renz, The Jossey-Bass handbook of nonprofit leadership and management : Fourth Edition. John Wiley&Sons. New Jersey, United States of America, 2016

- IhyaUl Ulum, Akuntansi Sektor Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi pertama. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta, 2010
- Krina L.P.L. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003
- Kurnia Utami Dan Efrizal Syofyan. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013
- LAN dan BPKP, Akuntabilitas Dan Good Governance, Jakarta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara, 2000
- Maddatuang, B., Sabara, Z., Wekke, I. S., & Karim, A. (2020). Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin. Penerbit Qiara Media.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. 2013.
- Manggaukang Raba, Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press, 2006
- Mulyadi. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : STIE YPKPN, 2009
- Mursyidi, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama, 2013
- Nico Andrianto, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro, Cara Menggunaka dan Memaknai Path Analysis. Bandung : Alfabeta, 2011
- Sadu Wasistiono, Prospek Pembangunan Desa. Bandung : CV Fokusmedia, 2007
- Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, Pedoman Penyusunan Skripsi, 2017
- Singgih Santoso, 2010, Statistika Parameterik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono., Metodologi Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2017
- Sri Mulyani Indrawati. Buku Pintar Dana Desa. Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta, 2017
- Tahir, M. T., Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kas Pada Pt Shoyumu Makmur Sinergy Di Makassar. Economics Bosowa, 6(005), 25-31. 2021.
- Tegar Zudewa Putra, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaranpendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Sukatani, Sukadamai, Dan Muara Sugih Di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin), Universitas Muhammadiyah Palembang, Skripsi Tidak diterbitkan, 2019